

Masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek*

Adam MALIK

Sebelum saya mengutarakan gagasan-gagasan saya mengenai masalah Kampuchea yang kompleks dan delikat itu, mungkin ada baiknya kalau kita mengenang secara singkat rangkaian kejadian yang mengakibatkan situasi konflik yang tak stabil di Kampuchea sekarang ini.

Sesudah akhir Perang Pasifik menjadi jelas bahwa perkembangan di Semenanjung Indocina selaras dengan pola umum kejadian-kejadian yang menandai percaturan politik dan militer negara-negara besar dalam usaha mencari akomodasi mengenai berbagai kawasan krisis di dunia. Hasil Konperensi Jenewa tahun 1954 bisa diduga memuaskan negara-negara besar itu dalam usaha mereka mencari akomodasi dan penyesuaian prioritas-prioritas politik dan militer mereka masing-masing, tetapi di lain pihak situasi akibatnya merampas hak bangsa-bangsa Semenanjung Indocina atas kedaulatan politik dan pembangunan ekonomi kembali.

Selama dasawarsa 1950-an, Kamboja - nama negeri ini waktu itu - berusaha mempertahankan kebebasan dan kemerdekaannya dengan memelihara suatu hubungan berimbang dengan negara-negara tetangga dekatnya, khususnya Muangthai di satu pihak dan Vietnam Utara serta Vietnam Selatan di lain pihak. Nasionalisme Kamboja diungkapkan melalui partisipasinya dalam Konperensi Afro-Asia di Bandung, bulan April 1955. Delegasi Kamboja dipimpin oleh Pangeran Ncrodom Sihanouk yang mu'tabar yang belum lama ini mengadakan kunjungan sentimental ke tempat Konperensi Asia-Afrika di Bandung itu.

*Diambil dari Keynote Address yang disampaikan Adam MALIK, bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Pertemuan Umum Tahunan Press Foundation of Asia, mengenai Masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek, di Hong Kong pada tanggal 28 Februari 1984. Diambil oleh Kirdi DIPOYUDO.

Akan tetapi perjuangan Kamboja untuk kebebasan dan kemerdekaan dihambat selama dasawarsa 1960-an oleh apa yang bisa disebut perang Indocina ketiga, periode yang banyak dicaci yang menyaksikan meningkatnya konflik negara besar yang antara lain diproyeksikan ke kawasan Indocina. Dalam arsip Press Foundation of Asia - saya yakin - juga terdapat banyak laporan mengenai periode khusus konflik Amerika-Cina di kawasan itu. Mungkin tampak aneh bagi kita yang meninjau kejadian-kejadian periode itu dari perspektif tahun 1984 bahwa konflik Indocina itu sebagian besar adalah burne-rang akibat percaturan kekuatan Amerika-Cina untuk mendapatkan pengaruh di zona dan kawasan ini. Cukup ironis bahwa kejadian-kejadian di Kampuchea dewasa ini terutama adalah suatu ungkapan konvergensi politik Amerika-Cina melawan persepsi bahaya Soviet dan persaingan Cina-Soviet.

Kejadian-kejadian pada tahun 1965-1975 membawa Kamboja ke pusaran konflik regional, sebagai suatu faktor yang jelas dalam percaturan kekuatan internasional. Pada tahun 1970, Pangeran Norodom Sihanouk disingkirkan dari kekuasaan lewat suatu kudeta hanya beberapa minggu setelah ia dituduh oleh sesama warga bangsa Khmer bahwa ia terlalu lembut bagi Pasukan Vietcong yang beroperasi dalam wilayah Kamboja. Kira-kira 10 tahun kemudian, situasi di Kampuchea -- namanya sekarang -- mengalami suatu metamorfosis atau perubahan yang sama sekali berlainan ketika ia diserbu dan kemudian diduduki oleh pasukan Vietnam. Dengan sedih hati kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tiada pemerintah di Phnom Penh, bahkan rezim Heng Samrin sekarang ini dengan dukungan penuh pasukan pendudukan Vietnam pun tidak, yang mampu mengklaim suatu tingkat kekuasaan politik maupun teritorial yang cukup atas negeri itu untuk memungkinkan rakyat Kampuchea melancarkan pembangunan ekonomi kembali yang sangat diperlukan oleh negeri yang banyak mengalami kerusakan itu.

Setelah meninjau kembali kejadian-kejadian di Semenanjung Indocina itu secara singkat, tidaklah sulit menyimpulkan bahwa perkembangan di Kampuchea adalah akibat konflik kepentingan dan pengaruh antara RRC dan Vietnam sebagai perluasan persaingan Cina-Soviet. Ini jelas bukan konflik antara negara-negara ASEAN dan Vietnam. Akan tetapi, membiarkan masalah Kampuchea itu berlarut-larut juga tidak menguntungkan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Sebaliknya, situasi semacam itu bisa menjadi suatu ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Asia Tenggara dan menghambat implementasi gagasan ZOPFAN - Zona Damai, Bebas dan Netral - seperti digariskan dalam Deklarasi ASEAN yang dikeluarkan di Kuala Lumpur tahun 1971.

Kita mengetahui usaha-usaha ASEAN mencari suatu penyelesaian politik masalah Kampuchea yang menyeluruh lewat PBB dan kemudian lewat

Konperensi Internasional mengenai Kampuchea (KIK) bulan Juli 1981. Saya tidak perlu membicarakan kata-kata diplomasi usaha-usaha ini secara panjang lebar. Kata-kata itu cukup jelas dan cukup koheren: penarikan semua pasukan asing dari Kampuchea; hak penentuan-diri bangsa Kampuchea tanpa campur tangan asing; dan pemilihan umum yang bebas di bawah pengawasan PBB.

Program itu untuk negara-negara anggota ASEAN merupakan landasan yang paling praktis yang memungkinkan negara-negara Kawasan Asia Tenggara hidup bersama secara damai dan membina hubungan yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu sangat disayangkan bahwa usaha-usaha yang jujur itu sejauh ini tidak mendapat tanggapan positif dari Vietnam. Sebaliknya, bersama Laos dan rezim Heng Samrin di Kampuchea, ia menandakan bahwa situasi di Kampuchea itu tidak bisa dibalik, dan di bawah kedok membuktikan apa yang disebut maksud-maksud damainya bahkan mengajukan usul-usul tandingan seperti: mengadakan Konperensi Internasional mengenai Asia Tenggara untuk membicarakan masalah-masalah keamanan Asia Tenggara, termasuk pangkalan-pangkalan asing dan soal Timor Timur; membentuk "zona-zona pengaman" sepanjang perbatasan Muangthai-Kampuchea; dan menarik apa yang dinamakan pasukan-pasukan reaksioner Pol Pot yang didukung Muangthai di selatan dan pasukan-pasukan Cina di utara. Menurut ketiga negara Indocina, ini merupakan syarat-syarat yang relevan untuk memelihara *status quo* di Kampuchea. Usul-usul ini bukan saja mempersoalkan kejujuran mereka tetapi juga tidaklah sulit melihat mengapa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat menerimanya.

Untuk menghadapi sikap keras kepala Vietnam ini, suatu kelompok perlawanan dibentuk antara FUNCIPPEC di bawah Pangeran Norodom Sihanouk, KPNLF di bawah Son Sann dan Khmer Merah di bawah Khieu Samphan sebagai Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis. Pembentukan pemerintah ini tidaklah mudah, tetapi melewati suatu periode "off-and-on" yang lama dan sering menimbulkan frustrasi. Akan tetapi akhirnya, dengan dukungan penuh negara-negara anggota ASEAN, Deklarasi Pembentukan Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1982 dan kemudian diumumkan pembentukan pemerintah ini dengan Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Presiden, Khieu Samphan sebagai Wakil Presiden dan Son Sann sebagai Perdana Menteri di suatu tempat di Kampuchea pada bulan Juli 1982.

Dengan pembentukan Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis ini dapat dikatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN mencapai suatu kemenangan politik dalam usaha mereka yang tak mengenal lelah untuk mencari suatu penyelesaian bagi masalah Kampuchea. Sebaliknya, perkembangan baru ini merupakan suatu pukulan bagi kebijaksanaan Vietnam. Vietnam dan

beberapa negara lain bisa mengatakan bahwa Pemerintah Koalisi itu tidak akan tahan lama tetapi fakta-fakta membuktikan lawannya. Pembentukan pemerintah ini membangkitkan kepercayaan dunia internasional, yang mula-mula menunjukkan tanda-tanda luntur, akan pemerintah itu seperti terbukti dari pernyataan-pernyataan mendukung surat-surat kepercayaan Kampuchea Demokratis dan resolusi mengenai Kampuchea sejak sidang Majelis Umum PBB tahun 1979. Dukungan untuk Kampuchea Demokratis jelas meningkat.

Dalam keadaan sekarang ini Vietnam rupanya tidak senang dengan persetujuan kompromi mana pun yang bisa memenuhi tuntutan minimal mencegah pembentukan suatu pemerintah yang bermusuhan di Phnom Penh. Menurut dugaan, orang-orang Vietnam tidak pernah memikirkan gagasan koalisi itu sebagai suatu penyelesaian untuk konflik politik itu, tetapi sebagai salah satu tahap ke arah penyelesaian final di mana sasaran akhirnya jelaslah penguasaan Vietnam atas kendali kekuasaan di Phnom Penh. Selain itu, segala penyelesaian politik di Kampuchea berdasarkan persetujuan kompromi mana pun yang menuntut penarikan Vietnam tidak dapat dibangun atas kepercayaan semata-mata. Ia akan memerlukan suatu sistem jaminan yang terperinci yang sudah barang tentu lebih mudah dirumuskan daripada dilaksanakan. Lagipula, kendati prospek menghadapi ketetapan Cina yang hebat, Pemerintah Hanoi rupanya bertekad untuk menjalankan kekuasaannya di Phnom Penh atas dasar kekuatan militer, selama Uni Soviet bersedia dan mampu menopang ekonomi Vietnam.

Dalam kunjungannya ke negara-negara anggota ASEAN bulan Juli 1982, Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Co Thach mengutarakan sasaran-sasaran Vietnam di Kampuchea dan dengan kedok menunjukkan "itikad baik" Vietnam terhadap dunia internasional mengajukan lima kemungkinan perkembangan politik di Asia Tenggara: (1) Cina akan berkomplot dengan Amerika Serikat dan ASEAN untuk menentang negara-negara Indocina, sedangkan ASEAN akan terus menganut kebijaksanaan konfrontasinya sekarang ini terhadap negara-negara Indocina; (2) negara-negara Indocina, ASEAN dan Cina akan memperbaiki hubungan mereka masing-masing; (3) dalam komplotan dengan Amerika Serikat dan ASEAN, Cina akan melancarkan perang total melawan ketiga negara Indocina; (4) ASEAN dan negara-negara Indocina akan menjalin hubungan yang lebih erat, sedangkan Cina di lain pihak akan terus menentang negara-negara Indocina; dan (5) Cina akan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Indocina, sedangkan negara-negara ASEAN akan meneruskan kebijaksanaan bermusuhan dengan negara-negara yang terakhir itu.

Usaha-usaha Uni Soviet dan Cina untuk saling menjajaki baru-baru ini ternyata mempengaruhi sikap Vietnam. Kalau tanda-tanda mengisyaratkan kebi-

jaksanaan yang lebih lunak, hal ini adalah akibat kemungkinan penyelesaian masalah Kampuchea yang dipaksakan di masa mendatang melalui kombinasi penengahan Cina-Soviet? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, izinkan saya menunjuk pada usaha-usaha Vietnam untuk mendekati dan memulai suatu dialog dengan ASEAN atau pada kenyataan bahwa Vietnam telah melakukan usaha-usaha diskrit untuk mengadakan kontak dengan Sihanouk melalui apa yang dinamakan "prakarsa Belgium." Jalan lain ialah apa yang disebut Konsep Rumania yang sangat mirip dengan Konsep Perancis yang mengusulkan suatu dialog langsung antara Sihanouk dan Vietnam bersama Heng Samrin. Ini adalah usul-usul di luar kerangka KIK.

Akan tetapi sudah harus sangat jelas bahwa usaha-usaha terpuji para perantara, pelancar, penengah dan apapun namanya, untuk mengatur suatu dialog antara Sihanouk dan Vietnam tidak boleh menimbulkan gesekan di antara anggota Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis, yang menikmati dukungan penuh negara-negara anggota ASEAN. ASEAN tidak dapat menerima usul mana pun yang, sebagai akibat kemungkinan dialog Sihanouk-Vietnam, bisa merenggangkan hubungan antara para anggota Pemerintah Koalisi.

Kita ingat bahwa pergantian pemerintah di Australia juga mengakibatkan suatu perubahan dalam pendekatan Australia terhadap Vietnam dalam arti bahwa Pemerintah Australia sekarang ini bermaksud memulihkan program bantuannya untuk Vietnam, seperti diberitahukan Menteri Luar Negeri Bill Hayden kepada rekan-rekan ASEAN-nya. Sikap Australia itu memancing keberatan ASEAN yang menganggap waktu maksud Australia itu kurang tepat. Lagipula, ASEAN merasa bahwa bantuan semacam itu bisa dimanfaatkan Vietnam untuk tujuan-tujuan militer. Yang lebih mencemaskan ialah bahwa hal itu menimbulkan kesan seolah-olah Australia tidak mendukung usaha-usaha ASEAN mencari suatu penyelesaian untuk masalah Kampuchea. Sejauh ini Australia belum meneruskan program bantuannya untuk Vietnam. Diduga bahwa ia memberitahukan kepada ASEAN akan berkonsultasi dengan ASEAN sebelum melaksanakan program bantuannya untuk Vietnam. Indonesia memandang maksud Australia untuk membantu itu sebagai politik yang tidak praktis. Akan tetapi pada prinsipnya Indonesia tidak akan berkeberatan kalau bantuan itu diberikan dengan pertimbangan kemanusiaan dalam kerangka PBB.

Saya menyebutkan sasaran Australia ini karena ia juga berkaitan dengan pernyataan keinginan Australia untuk bertindak sebagai "pelancar" (facilitator) dalam usaha mencari suatu penyelesaian masalah Kampuchea. Di atas saya menekankan bahwa ASEAN tidak dapat menerima bahwa kemungkinan dialog Sihanouk-Vietnam menimbulkan gesekan dalam

Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis. Demikian pun kita harus waspada di ASEAN terhadap tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan perselisihan dalam ASEAN.

Usaha-usaha diplomasi ASEAN selama empat tahun terakhir berhasil mencegah Vietnam mewujudkan ambisi-ambisi politiknya di Kampuchea secara penuh. Tetapi usaha diplomasi saja tidak mampu membalik kebijaksanaan Vietnam seperti terlihat dalam boikotnya terhadap Konferensi Internasional mengenai Kampuchea bulan Juli 1981.

Di lain pihak, kita akan merugikan usaha ASEAN dengan mengira bahwa bentrokan-bentrokan perbatasan Cina-Vietnam akan memperlemah penguasaan militer Vietnam atas Kampuchea atau bahwa keprihatinan dan prioritas-prioritas Cina sehubungan dengan persepsinya mengenai kehadiran Soviet di Vietnam akan mengurangi bantuan militer, ekonomi dan politik Soviet untuk Vietnam. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada negara ASEAN, apalagi Indonesia, yang ingin melihat dominasi Vietnam di Kampuchea dan Laos digantikan dominasi Cina, dan ini juga bukan soal memilih hal buruk yang lebih kecil.

Saya berani meramalkan bahwa soal paling sulit yang akan muncul di gelanggang internasional ialah bagaimana menghadapi isu kemungkinan Khmer Merah berkuasa lagi, kendati kehadiran pasukan Vietnam di Kampuchea. Selama tiga tahun terakhir ini kita menyaksikan perspektif-perspektif strategis yang berlainan di antara negara-negara anggota ASEAN mengenai isu itu. Walaupun ASEAN mengambil posisi diplomasi bersama, kadang-kadang terlihat adanya perbedaan-perbedaan dalam soal-soal yang berkaitan dengan taktik, khususnya sehubungan dengan pasukan Khmer Merah, ini jelas.

Masalahnya menjadi lebih sulit akibat apa yang bisa kita namakan negasi dosa-dosa. Dalam pandangan negara-negara ASEAN khususnya dan masyarakat internasional umumnya, Vietnam melanggar suatu asas pokok hukum internasional dan dalil-dalil Non-Blok dengan menyerbu Kampuchea bulan Desember 1978. Cukup ironis, bahwa intervensi Vietnam yang mengakibatkan tersingkirnya rezim Pol Pot mula-mula - dan saya ingin menekankan mula-mula - mempunyai daya pengumpul (leverage) moral dan diplomatik yang besar. Sudah barang tentu cukup mudah memikirkan dalam suatu kerangka internasional pedoman-pedoman teoretis yang diproyeksikan untuk suatu formula menyeluruh menuju penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bisa diterima bahkan oleh Cina, Uni Soviet dan ASEAN. Tetapi apakah formula semacam itu bisa dilaksanakan dalam praktek? Terlepas dari segala retorika, adakah orang yang ingin menempatkan taruhan atas atau

meramalkan arah yang kiranya akan ditempuh oleh kejadian-kejadian di Kampuchea itu sendiri?

Saya misalnya sama sekali tidak yakin bahwa setelah pernyataan bebas dilangsungkan di bawah pengawasan PBB atau bentuk-bentuk lain observasi atau pengawasan internasional yang disetujui, suatu Pemerintah Koalisi yang mencakup semua fraksi Khmer bisa tahan lama. Kita ingat bahwa Pangeran Sihanouk itu sendiri berulang kali menyatakan bahwa Khmer Merah akan menyingkirkannya sekali mereka mengetahui bahwa manfaat diplomatik dan legalnya telah melayani maksud mereka.

Lalu apakah prospek-prospek untuk suatu penyelesaian? Kalau saya diizinkan menyampaikan pandangan saya, bersama unsur-unsur yang menyertainya, masalah Kampuchea berkisar pada faktor-faktor berikut. Di tingkat makro-strategi terakhir, faktor geo-strategis masalah Kampuchea yang paling menonjol ialah permusuhan antara Cina dan Vietnam, yang merupakan ungkapan antagonisme tradisional dan historis yang menjadi lebih sengit dan tajam akibat sifat hubungan Cina-Soviet sekarang ini. Dengan demikian, dalam hal ini, suatu ulangan seruan agar dicapai sepakat kata antara Cina, Vietnam dan Uni Soviet rupanya merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Mengenai isu itu ada isyarat-isyarat berlanjut (dan kadangkadangkang bertentangan) antara Beijing dan Moskwa. Tetapi saya merasa bahwa ASEAN mungkin harus mengarahkan seruan kolektifnya lebih langsung kepada ketiga negara komunis itu. Suatu pertemuan segi tiga antara Cina, Vietnam dan Uni Soviet dengan fokus Indocina akan merupakan suatu awal yang menggembirakan. Hasil pertemuan serupa itu kemudian bisa dibandingkan dengan posisi ASEAN yang dibatasi di atas.

Kedua, akses ke sumber-sumber kekuatan tandingan, termasuk kekuatan diplomatik di PBB dan lain-lain forum internasional, harus dipertahankan, tetapi *tidak* dengan maksud untuk memojokkan Vietnam mengenai Kampuchea.

Negara-negara ASEAN secara konsisten berusaha meyakinkan Pemerintah Cina, bahwa penyelesaian politik menyeluruh yang diinginkan harus memperhatikan kepentingan *semua* pihak yang bersangkutan. Akan tetapi kalau Pemerintah Cina tidak bersedia menerima pemindahan pemerintah di Phnom Penh dan berkeras menginginkan peranan Khmer Merah sebagai kekuatan dominan dalam suatu koalisi rujuk nasional, maka prospek penyelesaian akan tetap suram.

Mengenai pelaksanaan transisi damai ke suatu pemerintah rujuk nasional, paling tidak asas-asas umum berikut harus disetujui. *Pertama,*

penarikan pasukan Vietnam seperti diserukan oleh masyarakat internasional selama empat tahun terakhir. Kalau Vietnam merasa bahwa penarikan semacam itu harus diimbangi konsesi ASEAN, Himbuan Bersama ASEAN 6 September 1983 memberikan suatu jalan yang baru, walaupun modes, yaitu penarikan bertahap dari perbatasan Muangthai-Kampuchea.

Kedua, penarikan pasukan Vietnam harus diawasi oleh satuan-satuan semua pihak yang bersangkutan. Jumlah pihak yang bersangkutan itu bisa disetujui sebelumnya, sambil memperhatikan keprihatinan Vietnam dan rezim Heng Samrin mengenai kedaulatan. Ini akan berarti kehadiran sementara pasukan multinasional seluruhnya atau sebagian di bawah pengawasan PBB. Kasus pihak-pihak jauh tetapi berkepentingan seperti Australia dan Perancis bisa dipertimbangkan kalau kehadiran pasukan ASEAN oleh Vietnam dan rezim Heng Samrin dianggap terlalu memihak.

Ketiga, semua fraksi Khmer, termasuk rezim Heng Samrin harus menyetujui diadakannya pernyataan bebas oleh rakyat Khmer. Mula-mula pernyataan itu bisa dilakukan berdasarkan suatu referendum, yang akan disusul pemilihan umum mengenai pembentukan suatu pemerintah rujuk nasional Khmer yang lengkap. Referendum dan pemilihan itu bisa diadakan di bawah pengawasan badan atau kelompok negara yang mengawasi penarikan pasukan Vietnam.

Keempat, untuk menghindari pertumpahan darah akibat permusuhan dan dendam yang lampau, harus ada suatu program rekonstruksi dan pembangunan nasional yang baru, yang berdasarkan rekonsiliasi, kedaulatan, non-campur tangan dan sikap non-blok. Program rekonstruksi dan pembangunan nasional itu haruslah suatu model usaha nasional yang akan membuktikan bahwa kendati penderitaannya yang hebat dan pahit di masa lampau, bangsa Khmer bisa lahir kembali melalui persatuan nasional berdasarkan kebebasan, pemerintah demokratis dan persamaan kesempatan serta keadilan untuk semua. Negara-negara Non-Blok hendaknya juga menghimbau masyarakat internasional agar memberikan bantuan cuma-cuma kepada pemerintah baru itu untuk rekonstruksi nasional, sehingga bangsa Kampuchea bisa meneruskan pembangunan internnya tanpa tekanan-tekanan dan campur tangan politik dan militer asing yang tidak pada tempatnya.

Sudah barang tentu program rekonstruksi dan pembangunan nasional ini harus memperhatikan seluruh pimpinan fraksi dalam masyarakat Khmer yang lebih besar. Namun saya penuh harapan, bahwa kalau persetujuan-persetujuan dan prosedur-prosedur bisa diadakan dari tingkat paling bawah sampai eselon-eselon tertinggi birokrasi yang disusun kembali, perbedaan-perbedaan itu bisa diminimalkan dan akhirnya disingkirkan.

Saya menyadari, bahwa sisa-sisa masalah mengenai ideologi dan manuver politik akan tetap di dalam dan di luar pemerintah nasional. Ini tidak dapat dihindari, mengingat sifat dan tahan lamanya kepahitan yang kita saksikan selama 15 tahun terakhir ini di negeri itu.

Sudah barang tentu saya menyadari, bahwa argumen-argumen yang saya ajukan ini tak lain ialah goresan-goresan tentatif (coba-coba), gagasan-gagasan pendahuluan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang memikirkan prospek jangka pendek maupun jangka panjang Kampuchea dan sebenarnya juga seluruh Asia Tenggara.

Pada analisa terakhir, alternatifnya terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Kalau fraksi-fraksi dan unsur-unsur pimpinan kelompok-kelompok Khmer bertekad bahwa tujuan mereka masing-masing adalah penghancuran semua kekuatan tandingan lainnya, maka kita akan menyaksikan meningkatnya kasus-kasus kekejaman, kematian dan berlanjutnya penderitaan bangsa Kampuchea.

Mungkin satu-satunya cara untuk membujuk teman-teman Khmer saya ialah menceriterakan kembali pengalaman-pengalaman Indonesia yang lampau dengan pemberontakan, gerakan-gerakan separatis dan fanatisme keagamaan maupun ideologis. Semuanya itu mendatangkan penderitaan bagi bangsa Indonesia, tetapi untungnya tidak satu pun berhasil merebut kekuasaan.

Bangsa Kampuchea telah menderita cukup lama akibat tekanan-tekanan internasional dan regional. Jelas mereka tidak dapat menderita putaran kekejaman dan kebencian yang lain lagi yang diakibatkan atau dilakukan oleh sesama warga bangsa mereka atau suatu permainan kekuatan-kekuatan asing yang tidak bisa dibenarkan.

Akhirnya, Indonesia bersama rekan-rekan ASEAN lainnya akan terus mencari suatu penyelesaian politik untuk masalah Kampuchea atas dasar resolusi-resolusi PBB dan dalam kerangka Deklarasi KIK.

Dalam usahanya mencari suatu penyelesaian masalah Kampuchea itu, ASEAN sepakat untuk menerima segala usul dari sumber mana pun asal usul itu berada dalam kerangka KIK. Negara-negara anggota ASEAN selanjutnya sepakat untuk memelihara kontak-kontak dengan Vietnam sambil tetap berpegangan pada asas-asas yang ditetapkan dalam resolusi-resolusi PBB mengenai Kampuchea

Indonesia membatasi bantuannya untuk perjuangan yang dipimpin oleh Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis di bawah Pangeran Norodom

Sihanouk pada dukungan politik dan bantuan kemanusiaan, seperti pakaian dan bantuan medis. Indonesia tidak memberikan senjata.

Dalam hubungan bilateral, Indonesia akan terus mengusahakan dan memelihara hubungan bersahabat dengan Vietnam, kendati adanya perbedaan pandangan mengenai masalah Kampuchea, dengan maksud untuk mencegah Vietnam merasa terpengaruh. Indonesia tidak beranggapan bahwa kebijaksanaan ASEAN mengenai masalah Kampuchea merupakan suatu kendala atas hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia.

Itulah beberapa gagasan mengenai masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek.